

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki empat tujuan yang terdiri dari, (1) mengidentifikasi konflik-konflik yang terjadi serta alternatif pengelolaan dari masing-masing *stakeholder* pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu, (2) mengidentifikasi dan memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Wisata kuliner Payung Kota Batu, (3) menentukan sub kriteria untuk penilaian alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung, dan (4) menentukan prioritas alternatif kebijakan pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan pada bab IV, maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1 Konflik Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Proses identifikasi kondisi sosial dan potensi konflik yang terjadi pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung dilakukan dengan menggunakan analisis konflik. Variabel yang digunakan pada analisis konflik adalah kondisi sosial stakeholder dengan parameter yang digunakan terdiri dari alternatif penyelesaian konflik, faktor penyebab konflik, fungsi dan kewenangan masing-masing *stakeholder* yang terlibat.

Berdasarkan hasil analisis terdapat 10 *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. *stakeholder* tersebut terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Perum Perhutani KPH Malang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto, paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung, PT. Indofood Sukses Makmur, Pemerintah Kelurahan Songgokerto. Tetapi berdasarkan hasil analisis konflik tidak semua *stakeholder* terlibat konflik pengelolaan dengan *stakeholder* yang lain. *Stakeholder* yang terlibat konflik pengelolaan berjumlah 9 *stakeholder* yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Perum Perhutani KPH Malang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Songgokerto, paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung, dan Pemerintah Kelurahan Songgokerto. Sedangkan PT. Indofood Sukses Makmur merupakan *stakeholder* yang tidak terlibat konflik pengelolaan dengan *stakeholder* yang lain. Konflik pengelolaan yang terjadi pada pengelolaan Wisata Kuliner Payung berdasarkan hasil analisis konflik adalah sebagai berikut.

1. Konflik Proses Perijinan Wisata Kuliner Payung

Proses perijinan Wisata Kuliner Payung belum selesai yang disebabkan oleh belum terpenuhi seluruh prosedur perijinan. Langkah awal yang dilakukan oleh pihak paguyuban Wisata Kuliner Payung adalah membuat kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Malang yaitu dengan membayar sewa lahan setiap satu bulan sekali kepada Perum Perhutani KPH Malang kemudian Perum Perhutani akan memberikan Surat Keputusan Perijinan kepada Wisata Kuliner Payung. Setelah memperoleh ijin dari Perum Perhutani KPH Malang maka paguyuban dapat melakukan proses perijinan kepada Pemerintah Kota Batu. Namun, kondisi yang terjadi adalah Perum Perhutani KPH Malang belum mengeluarkan Surat Keputusan Perijinan tersebut. Sehingga, secara langsung menghambat proses perijinan kepada Pemerintah Kota Batu. Selain itu, terdapat salah satu prosedur perijinan yang belum dibuat oleh paguyuban Wisata Kuliner Payung yaitu penyusunan dokumen AMDAL. Hal ini disebabkan kegiatan yang ada di Wisata Kuliner Payung sudah mengubah peruntukan fungsi hutan. Konflik ini melibatkan Perum Perhutani KPH Malang dan LPMK Songgokerto karena seharusnya kedua *stakeholder* tersebut memberikan pendampingan dan pengarahan terkait dengan penyusunan AMDAL namun hal tersebut tidak dilakukan.

2. Konflik Kebijakan atau Peraturan Wisata Kuliner payung

Konflik ini dipengaruhi oleh konflik yang sebelumnya yaitu proses perijinan yang belum selesai sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan Wisata Kuliner Payung. Saat ini pada proses pengelolaan Wisata Kuliner Payung tidak terdapat kebijakan yang dijadikan acuan. Sehingga ketika terjadi perbedaan pengelolaan tidak ada dasar yang tepat dalam pengambilan keputusan. Ketidakadaan kebijakan atau peraturan juga berhubungan dengan konflik terkait penentuan batas lokasi Wisata Kuliner Payung. Penentuan batas ini menjadi salah satu konflik yang belum dapat diselesaikan karena hingga saat ini tidak ada kebijakan yang menyebutkan lokasi yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun sehingga pedagang Wisata Kuliner Payung

merasa memiliki kebebasan membuka lokasi baru untuk membangun bangunan warung baru.

3. **Konflik Struktur Organisasi dan Kejelasan Tupoksi dari Masing-Masing *Stakheolder***
Konflik ini menjadi salah satu konflik yang menghambat pengelolaan Wisata Kuliner Payung. Hal ini dapat dilihat masih ada tumpang tindih dari tupoksi msing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan Wisata Kuliner Payung. konflik semakin diperkuat karena terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing *stakeholder*, baik pendapat dari tugas *stakeholder* itu sendiri dan pemahaman tugas *satkeholder* yang lain terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung.
4. **Konflik Pemanfaatan Hutan**
Meskipun belum terdapat kebijakan atau peraturan yang mengatur Wisata Kuliner Payung, namun peruntukan hutan yang digunakan sebagai lokasi Wisata Kuliner Payung sudah diatur dalam RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 yaitu sebagai hutan penyangga dengan kegiatan konservasi dan kegiatan ekonomi. Kedua kegiatan tersebut seharusnya dilakukan secara seimbang sehingga tidak ada komponen yang dirugikan. Namun, kondisi ini menjadi konflik karena pemanfaatan yang dilakukan lebih didominasi dengan kegiatan ekonomi yang tidak diimbangi dengan kegiatan konservasi.
5. **Konflik Operasional Kegiatan Wisata Kuliner Payung**
Konflik ini terdiri dari penentuan standarisasi harga barang, pemanfaaaan air dan pengelolaan limbah. Konflik yang berkaitan standarisasi harga barang terjadi antara paguyuban atau pedagang dengan LPMK Kelurahan Songgokerto. Konflik lain yang muncul adalah penggunaan air yang dilakukan oleh pedagang di Wisata Kuliner Payung tidak hanya untuk kegiatan berdagang tapi juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu pedagang juga tidak mampu melakukan pengelolaan sampah secara komunal sehingga banyak pedagang yang membuang sampah ke hutan yang ada di bawah lokasi berdagang.
6. **Konflik Terkait Bentuk Bangunan**
Konflik ini terjadi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dengan paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung. Konflik tidak berhubungan dengan konflik lain atau dapat dikatakan konflik ini berjalan sendiri.

5.1.2 Tingkat Kepentingan dan Tingkat Pengaruh Stakeholder

Penentuan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh *stakeholder* ditentukan berdasarkan hasil analisis *stakeholder*. Variabel yang digunakan adalah tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh dengan menggunakan parameter yang sudah diperoleh berdasarkan

penelitian terdahulu. Setiap paramater dinilai menggunakan cara skoring sehingga menghasilkan nilai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh masing-masing *stakeholder*. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi adalah paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung dan *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan terendah adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu. Sedangkan *stakeholder* yang memiliki tingkat pengaruh tertinggi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu dan *stakeholder* yang memiliki tingkat pengaruh terendah adalah *supplier* barang atau PT. Indofood Sukses Makmur.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh *stakeholder* maka dilakukan pemetaan *stakeholder* dengan menggunakan *software minitab 17*. *Output* dari tahap pemetaan *stakeholder* yaitu menentukan *stakeholder* yang berada pada kuadran *stakeholder player*, *stakeholder actor*, *stakeholder subject*, dan *stakeholder spectator*. Berikut merupakan hasil pemetaan *stakeholder*.

1. *Stakeholder* yang berada pada kuadran Subjek (*Subject*) adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Songgokerto dan Pemerintah Kelurahan Songgokerto. Ketiga *stakeholder* tersebut memiliki kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
2. *Stakeholder* yang masuk pada kuadran Pemain (*Player*) adalah paguyuban pedagang Wisata Kuliner Payung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, Perum Perhutani KPH Malang dan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Batu. Semua *stakeholder* yang masuk pada kuadran ini sama-sama memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
3. *Stakeholder* yang masuk pada kuadran Penonton (*Spectator*) adalah Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Indofood Sukses Makmur. *Stakeholder* yang masuk dalam kuadran ini yaitu *stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang rendah.
4. *Stakeholder* yang berada pada kuadran Aktor (*Actor*) adalah Bappeda Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Kedua *stakeholder* tersebut memiliki pengaruh yang tinggi dengan sedikit kepentingan terhadap pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

5.1.3 Prioritas Alternatif Kebijakan Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menentukan alternatif kebijakan yang sesuai dengan pengelolaan Wisata Kuliner Payung. selain menentukan alternatif kebijakan, penelitian ini juga menentukan urutan alternatif pengelolaan Wisata Kuliner Payung.

Penentuan alternatif kebijakan dan urutan alternatif kebijakan menggunakan analisis *Multi Criteria Decision Making* dengan proses perhitungan menggunakan metode TOPSIS. Variabel yang digunakan pada analisis ini adalah lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial. Setiap variabel yang digunakan pada analisis MCDM memiliki sub variabel yang diperoleh dari hasil analisis *delphi*.

Berdasarkan hasil analisis *Multi Criteria Decision Making* menggunakan metode TOPSIS maka setiap alternatif dapat diurutkan sesuai dengan nilai preferensi yang paling besar ke nilai preferensi yang paling kecil.

Tabel 5.1

Urutan Peringkat Alternatif Pengelolaan Wisata Kuliner Payung

| Peringkat | Alternatif | Nilai Preferensi |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | A5 | 0,76750 |
| 2 | A3 | 0,72102 |
| 3 | A1 | 0,69951 |
| 4 | A6 | 0,53104 |
| 5 | A7 | 0,50777 |
| 6 | A4 | 0,38426 |
| 7 | A2 | 0,24777 |

Berdasarkan hasil analisis *Multi Criteria Decision Making* maka diperoleh Formulasi kebijakan Pengelolaan Wisata Kuliner Payung Kota Batu dengan urutan sebagai berikut.

1. Pembuatan peraturan sebagai acuan pengelolaan Wisata Kuliner Payung
2. Penyelesaian proses perijinan pengelolaan Wisata Kuliner Payung sesuai dengan peraturan perundangan pendirian bangunan
3. Pembentukan kelembagaan pengelolaan Wisata Kuliner Payung yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengembangkan pola kemitraan berbasis lingkungan hidup dan wisata
4. Pengelolaan kawasan wisata dengan melibatkan masyarakat lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. Penataan ulang dan renovasi bangunan warung untuk mengembalikan ciri khas Wisata Kuliner Payung
6. Pembangunan sistem pembuangan air limbah dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah)
7. Penyusunan standarisasi operasional warung

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka terdapat beberapa saran yang diberikan kepada pedagang Wisata Kuliner Payung, Pemerintah Daerah dan akademisi.

1. Pemerintah diharapkan membuat Peraturan Daerah yang terkait dengan pengelolaan Wisata Kuliner Payung
2. Pemerintah diharapkan memprakarsai untuk melakukan koordinasi dengan semua *stakeholder* yang terlibat dengan konflik kepentingan.
3. Pada proses pembuatan keputusan, para *stakeholder* diharapkan memperhatikan kriteria lingkungan sebagai dasar utama pengambilan keputusan
4. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan *stakeholder* yang terlibat dari eksternal Wisata Kuliner Payung (misal : PU Provinsi Jawa Timur) karena jalan pada lokasi Wisata Kuliner Payung berada dibawah pengelolaan Dinas PU dan Bina Marga Provinsi Jawa Timur.
5. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan kriteria yang tertinggi atau kriteria lingkungan dalam menentukan alternatif yang paling tepat digunakan dalam pengelola Wisata Kuliner Payung.
6. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan parameter yang terukur dalam melakukan analisis *stakeholder* yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh. Misalnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki instansi.